

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia tidak dapat terlepas dari pertumbuhan ekonomi pedesaan. Kemendesa dan PDTT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) mencatat rata-rata pertumbuhan ekonomi pedesaan mencapai 12%. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan potensi daerah adalah dengan memberikan perhatian lebih pada pembangunan daerah pedesaan. Dalam upaya pembangunan daerah provinsi Bali, terdapat lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa penyimpanan dan pinjaman dana. LPD (Lembaga Perkreditan Desa) merupakan lembaga keuangan non bank milik desa pakraman yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya.

Selain menjadi lembaga keuangan yang memberikan jasa simpan pinjam, LPD juga memberikan motivasi dan inovasi dalam kegiatan ekonomi di pedesaan. Dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa menyatakan bahwa tujuan pendirian LPD di setiap desa adat yaitu untuk menjaga ketahanan ekonomi Krama Desa Pakraman melalui tabungan yang teratur, terarah, dan penyaluran modal yang produktif. Pendirian LPD juga bertujuan untuk memberantas ijon dan gadai gelap, mendorong pemerataan dan kesempatan berusaha bagi setiap Krama Desa Pakraman, serta

bertujuan untuk meningkatkan daya beli, melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Salah satu LPD di Kabupaten Buleleng yaitu LPD Desa Anturan, telah berhasil mencapai tujuan dari LPD. Keberhasilan LPD Desa Anturan pada dasarnya karena pengelolaan kinerja yang baik. Dikutip dari *Balipost.com* (2018), total aset yang dikelola sekitar Rp 235 miliar, dengan kinerja pengurus, pemeriksaan keuangan dan pembinaan rutin, LPD Desa Anturan berhasil memperoleh laba usaha terbesar, sehingga masuk 10 besar LPD di Bali yang memiliki aset terbesar dan menghasilkan laba usaha terbesar. Selain itu, banyak LPD di Kabupaten Buleleng yang mengalami perkembangan. Jumlah LPD di Kabupaten Buleleng adalah 169, yang tersebar di 9 Kecamatan yaitu 14 pada Kecamatan Gerokgak, 25 pada Kecamatan Seririt, 16 pada Kecamatan Busungbiu, 17 pada Kecamatan Banjar, 21 pada Kecamatan Sukasada, 21 pada Kecamatan Buleleng, 18 pada Kecamatan Kubutambahan, dan 12 pada Kecamatan Tejakula. LPD senantiasa mengutamakan kelangsungan usahanya dengan memperhatikan kinerja dari operasional LPD bersangkutan.

Kinerja adalah tinjauan tingkat pencapaian implementasi rencana kegiatan atau kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi. Kinerja operasional merupakan kinerja yang diperoleh perusahaan dari program yang dilakukan berdasarkan standar yang telah ditentukan guna mencapai visi dan misi organisasi. Visi dan misi dari Lembaga Perkreditan Desa sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang lembaga Perkreditan Desa, mengarahkan untuk LPD memiliki visi dan misi organisasi yang berpijak pada 3 kata kunci yaitu sehat, berdaya guna,

dan pelayanan prima. Menurut Putra, dkk (2017) kinerja operasional merupakan pencapaian perusahaan dalam melakukan kegiatan operasi dalam kurun waktu tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan organisasi. Tingkat kesehatan LPD dinilai atas 5 (lima) faktor yaitu faktor permodalan dengan bobot penentu sebesar 25%, faktor aktiva produktif dengan bobot penentu 25%, faktor manajemen dengan bobot penentu sebesar 10%, faktor rentabilitas yang terdiri dari ROA dan BOPO dengan bobot penentu masing-masing sebesar 10%, dan faktor likuiditas yang terdiri dari alat likuid dan LDR dengan bobot penentu masing-masing sebesar 5%. Disamping kelima faktor tersebut, pelampauan atas batas maksimal pemberian kredit juga diperhitungkan sebagai faktor pengurang dari total hasil penilaian kesehatan LPD. Penilaian kesehatan LPD dilaksanakan secara rutin tiga bulan maupun secara insidental. Hasil penilaian kesehatan LPD disampaikan kepada pihak yang terkait untuk mendapatkan pembinaan guna memperbaiki kinerja LPD.

Namun sangat disayangkan kinerja operasional LPD di Kabupaten Buleleng belum maksimal, hal ini tercermin dari data tingkat kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng yang mengalami penurunan kondisi kesehatan.

Tabel 1.1
Data Kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng
Triwulan III Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan						
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Lapor	Baru Operasional
1	Gerokgak	14	6	2	2	4	-	-	-
2	Seririt	25	9	6	3	3	4	-	-
3	Busungbiu	16	5	3	3	-	5	-	-
4	Banjar	17	5	3	2	1	6	-	-
5	Sukasada	21	18	-	1	1	1	-	-

6	Buleleng	21	13	2	2	1	3	-	-
7	Sawan	18	10	4	3	-	1	-	-
8	Kubutambahan	22	9	7	2	2	2	-	-
9	Tejakula	15	12	1	2	-	-	-	-
Jumlah		169	87	28	20	12	22	-	-

Sumber : website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Tabel 1.2
Data Kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng
Triwulan IV Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah LPD	Data Kesehatan						
			Sehat	Cukup Sehat	Kurang Sehat	Tidak Sehat	Macet	Tidak Laport	Baru Operasional
1	Gerokgak	14	6	3	3	2	-	-	-
2	Seririt	25	9	7	2	3	4	-	-
3	Busungbiu	16	5	3	3	-	5	-	-
4	Banjar	17	6	1	3	1	6	-	-
5	Sukasada	21	16	3	-	1	1	-	-
6	Buleleng	21	9	3	3	2	3	1	-
7	Sawan	18	11	4	2	-	1	-	-
8	Kubutambahan	22	10	6	1	2	2	1	-
9	Tejakula	15	12	1	2	-	-	-	-
Jumlah		169	84	31	19	11	22	2	-

Sumber : website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dari data pada tabel 1.1 dan tabel 1.2 dapat dilihat, dalam kurun waktu 3 bulan beberapa LPD di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan kesehatan, bahkan untuk kategori tidak lapor bertambah menjadi 2 LPD. Beberapa LPD yang terindikasi tidak lapor diyakini terjadi akibat tertimpa kasus kolaps. Dikutip dari *BaliExpress-JawaPos.com* (2020), permasalahan yang dialami LPD Desa Adat Anturan sudah terjadi sejak awal tahun 2020. Kasus ini terjadi karena adanya kredit macet dan belum laku terjualnya aset LPD berupa aset tanah kaveling akibat pandemi covid-19. Sangat disayangkan LPD yang semula berhasil meraih prestasi, kini mengalami penurunan kesehatan yang sangat drastis. Belum usainya

permasalahan yang menimpa LPD Desa Adat Anturan Buleleng, kini LPD Desa Adat Tanjung, Kecamatan Kubutambahan dalam ambang kolaps. Pasalnya puluhan warga berniat mengambil uang tabungan di LPD Tanjung untuk keperluan hari raya, namun tidak bisa dicairkan. Dikutip dari *faktapers.id* (2021), LPD Desa Adat Tanjung mengalami kemacetan sejak tahun 2010. Tahun 2010 LPD Desa Adat Tanjung sudah mengalami kebangkrutan tapi dipaksakan sampai tahun 2015 dan hingga tahun 2020. Pihak pengelola LPD menyampaikan uangnya habis digunakan untuk membayar gaji, bunga, pelaksanaan acara gebyar, dan juga untuk membayar SHU ke Desa Adat.

Meningkatnya angka kemacetan pada LPD terus membayang-bayangi perekonomian desa. Sejak ditemukannya kondisi beberapa LPD masih dalam keadaan macet dan memburuknya kondisi LPD sampai pada kategori tidak lapor, pemerintah gencar melakukan pembinaan. Dikutip dari BaliPos.com (2018), pemerintah dan LP-LPD, BKS-LPD, dan kordinasi dengan BPD Bali sudah gencar melakukan pembinaan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga puluhan LPD macet dibiarkan begitu saja dan pemerintah merencanakan pencabutan izin LPD macet tersebut. Pembubaran LPD macet ini, akan berakibat pada berkurangnya lembaga yang membantu mengelola perekonomian di desa adat tersebut. Berdasarkan observasi penelitian awal melalui wawancara dengan Bapak Gede Sasnita Ariawan yang merupakan Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Buleleng, beliau mengatakan bahwa terjadinya kasus yang menimpa LPD di Kabupaten Buleleng adalah akibat terjadinya permasalahan pada mekanisme pengelolaan LPD yang berkaitan dengan

permasalahan internal, diantaranya modal, *basic* keilmuan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan juga dari sisi transparansi.

Tidak ingin LPD macet terus Pemerintah Pemkab Buleleng menyebutkan bahwa pentingnya membuat strategi dan terus berupaya melakukan pembinaan utamanya pada penguatan kinerja operasional LPD. Pengukuran kinerja operasional pada LPD dapat menentukan tingkat likuiditas, menentukan tingkat kestabilan usaha, dan tingkat keuntungan perusahaan dalam menghasilkan laba. Pentingnya penguatan kinerja operasional LPD utamanya pada operasional keuangan yaitu Bendahara, Bagian Dana dan Bagian Kredit. Hal ini harus dilakukan pada setiap LPD di Kabupaten Buleleng karena, LPD di Kabupaten Buleleng mengalami penurunan perolehan laba yang dari tahun 2018 sampai 2020.

Tabel 1.3
Perolehan Laba Pada Lembaga Perkreditan Desa di Kabupaten Buleleng
Dari Tahun 2018 – 2020

No	Kecamatan	Perolehan Laba		
		Tahun 2018 Rp (000)	Tahun 2019 Rp (000)	Tahun 2020 Rp (000)
1	Gerokgak	Rp 10.724.106	Rp 11.278.874	Rp 4.611.808
2	Seririt	Rp 2.449.007	Rp 2.515.188	Rp 1.950.477
3	Busungbiu	Rp 2.854.341	Rp 2.792.101	Rp 1.949.003
4	Banjar	Rp 1.705.402	Rp 1.856.813	Rp 1.373.426
5	Sukasada	Rp 6.164.764	Rp 5.877.535	Rp 4.380.804
6	Buleleng	Rp 12.807.223	Rp 12.093.798	Rp 5.623.445
7	Sawan	Rp 4.229.566	Rp 4.543.862	Rp 3.307.646
8	Kubutambahan	Rp 4.144.226	Rp 4.505.372	Rp 3.654.766
9	Tejakula	Rp 10.955.904	Rp 12.625.562	Rp 6.450.178
Total		Rp 56.034.539	Rp 46.810.231	Rp 33.301.553

Sumber : website resmi Pemerintah Kabupaten Buleleng

Dari tabel 1.3 perolehan laba pada LPD di Kabupaten Buleleng tahun 2018 sampai tahun 2020, terlihat bahwa LPD mengalami penurunan perolehan laba dan penurunan cukup drastis terjadi pada tahun 2020, yang diyakini akibat pandemi Covid-19. Lemahnya kinerja operasional LPD disebabkan salah satunya oleh kompetensi pengelola. Penelitian yang dilakukan (Saputra, dkk 2019) menunjukkan penyebab kebangkrutan LPD adalah kompetensi pengelola dan badan pengawas internal. Salah satu teori yang menjelaskan tentang kompetensi pengelola adalah teori keagenan. Menurut Jensen & Meckling (1976), hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Pemilik berkepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya dapat memberikan pendapatan yang maksimal, sedangkan manajemen berkepentingan dengan insentif untuk mengelola dana pemilik perusahaan. Kinerja operasional LPD sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat desa adat selaku *principal*.

Pengendalian internal adalah mekanisme efektif yang dapat dirancang untuk meminimalkan konflik keagenan. Menurut Arens, dkk (2010), pengendalian internal adalah suatu proses untuk memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan manajemen dalam kategori keandalan laporan keuangan. Sebuah sistem pengendalian internal diperlukan sebagai alat untuk membantu kegiatan pada perusahaan atau organisasi. Menurut Putra dan Widyawati (2019), pengendalian internal yang efektif dapat mengendalikan manajemen agar siap menghadapi perubahan ekonomi yang terus berubah seiring perkembangan zaman, dan terus berubah sesuai dengan aktivitas yang berlangsung dalam ekonomi pasar. Pengendalian internal berperan penting dalam perkembangan LPD, sistem pengendalian internal yang baik yang diterapkan pada LPD akan mewujudkan visi

dan misi dari LPD. Menurut COSO (*Tredway Committe Sponsor Organisation Committe*), pengendalian internal terdiri dari lima bagian yaitu, lingkungan, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Dengan bantuan sistem pengendalian internal, seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan operasional bagian kasir dilakukan untuk memastikan sepenuhnya bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal pada LPD akan menjamin keamanan harta milik perusahaan yaitu laba yang diperoleh dari setiap kegiatan atau program yang dijalankan, sehingga dengan penerapan sistem ini pada LPD akan dapat membantu badan pengawas internal LPD untuk senantiasa mengawasi kinerja operasional bendahara LPD, bagian dana dan kredit. Dalam menerapkan rancangan pengendalian internal, diperlukan pula sistem informasi akuntansi dengan tujuan membantu Kabag Dana LPD untuk memudahkan operasional pembukuan pada LPD.

Menurut Melasari (2017) dalam suatu organisasi atau lembaga keuangan menyelenggarakan dan membentuk sistem informasi akuntansi memiliki tujuan utamanya yaitu untuk mengelola data akuntansi, untuk mengurangi risiko dalam pengambilan keputusan, dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan kinerja operasional. Sistem informasi akuntansi yang handal merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja operasional LPD, karena sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengolah data keuangan dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang akan digunakan oleh pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Pada prinsipnya sistem informasi akuntansi memiliki peran penting khususnya bagian dana dan bagian kredit LPD dalam menjalankan tugasnya. Peran

sistem informasi akuntansi berperan dalam pengelolaan data keuangan LPD yang meliputi pencatatan keluar masuknya kas, pencatatan kredit, dan deposito. Sistem informasi akuntansi akan memberikan kualitas informasi yang relevan, reliabel, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dapat diakses dan dapat diverifikasi. Sistem informasi akuntansi juga memudahkan dalam proses akuntansi yang meliputi pencatatan, menjurnal, dan membuat laporan keuangan yang menjadi bentuk bertanggungjawab bagian dana dan kredit kepada bendahara LPD.

Dalam upaya dalam meningkatkan kinerja operasional LPD, selain dari sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal juga dapat dilakukan dengan menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaannya. Tujuan utama pendirian sebuah Lembaga Perkreditan Desa adalah untuk mencapai visi dan misi lembaga, serta meningkatkan kesejahteraan nasabah dengan memaksimalkan kekayaan lembaga melalui laba yang diperoleh. Namun di lain pihak, baik itu ketua, badan pengawas, bendahara maupun staf LPD, sebagai pengelola lembaga tidak memungkinkan untuk mempunyai tujuan yang berbeda, terutama dalam hal peningkatan prestasi dan kompensasi yang akan diterimanya. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya perlindungan atau pengawasan terhadap pihak berkepentingan yang dapat meminimalkan timbulnya biaya-biaya keagenan. *Good Corporate Governance* merupakan sebuah konsep yang menekankan pada kepentingan bersama sehingga nasabah memperoleh informasi dengan benar, transparan, akurat dan tepat waktu. Tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* digunakan sebagai formula untuk menciptakan pengelolaan operasional yang baik pada LPD yang meliputi 5 pilar yaitu transparan, wajar, akuntabilitas, independensi dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan

memperhatikan kepentingan *stakeholders*. *Stakeholders* LPD adalah nasabah, krama desa, pemerintah pengelolaan (Bendesa Pakrama) dan masyarakat adat desa.

Penerapan *Good Corporate Governance* saat ini wajib dimiliki dan diterapkan untuk menjadikan Lembaga Perkreditan Rakyat lebih maju, bisa dipercaya, dapat meningkatkan kesehatan organisasi, berumur panjang, mampu bersaing dan terhindar dari kasus kolaps. Menurut Nopiani (2015), mekanisme *Good Corporate Governance* diharapkan dapat mengurangi konflik kepentingan dan mampu untuk mengontrol biaya keagenan yang muncul akibat adanya konflik kepentingan dimana pengelola LPD tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan lembaga.

Keberhasilan dalam mencapai tujuan LPD untuk menghadapi persaingan dan meningkatkan kinerja operasional juga dapat dilihat dari faktor permodalan yaitu *Intellectual Capital* (IC). Hal ini sangat penting agar sumber daya yang dimiliki suatu LPD dapat digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. *Intellectual Capital* merupakan aset tidak berwujud yang sulit untuk diukur secara langsung. Menurut Rahayu (2016), *Intellectual Capital* didefinisikan sebagai kombinasi dari sumber daya *intangible*, keuangan dan sumber daya manusia dalam sebuah kecakapan sistem untuk menciptakan nilai pemangku kepentingan. Menurut praktisi Stewart (1997) pencetus pertama istilah ini menyatakan bahwa terdapat tiga unsur dalam *Intellectual Capital* yaitu modal manusia, modal struktural, dan modal pelanggan.

Modal manusia merupakan sumber dalam modal intelektual. Modal manusia menjadi sumber pengetahuan yang sangat berguna untuk menghasilkan solusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi LPD, yang terdiri dari

keterampilan dan kompetensi. Melalui modal manusia yang baik maka diharapkan dapat mengembangkan modal struktural. Modal struktural merupakan kemampuan organisasi memenuhi rutinitas operasional untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Modal struktural akan terkait bagaimana upaya LPD dalam menjaga kemampuan yang dimiliki. Modal pelanggan adalah hubungan antara LPD dengan mitra kerja. Mitra kerja pada LPD yaitu masyarakat desa adat selaku nasabah dan BPD selaku pembimbing dan pembina LPD untuk meningkatkan kesehatan masing-masing LPD. Apabila LPD dapat mengelola dan mengembangkan *Intellectual Capital* dengan baik maka akan mempengaruhi kinerja operasional LPD untuk dapat menghasilkan informasi keuangan, menentukan kelayakan pemberian kredit, dan menjaga hubungan baik kepada mitra kerja.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya masih ada ketidak konsistenan hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2016), Rizki (2019), Sopian dan Suwartika (2019), serta Putri dan Endian (2020), menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil yang berbeda terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Arifin (2018) dan Jelantik, dkk (2021), menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Terkait dengan hasil penelitian tentang pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kinerja operasional adalah penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2016), Andhika dan Sujana (2016), Purnamasari (2019), dan Setyaningrum (2020) menyatakan bahwa penerapan aplikasi sistem informasi akuntansi berpengaruh positif pada kinerja operasional. Namun penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2017), Rizki (2019),

serta Putri dan Endiana (2020) menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Terkait dengan pembaruan penelitian, penelitian ini merupakan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna (2016) yaitu dengan menambahkan kebaruan variabel *Good Corporate Governance* dan *Intellectual Capital*. Kebaruan variabel pertama pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja operasional, hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasa, dkk (2016), Mahaendrayasa dan Putri (2017), Arifin (2018), Astini dan Yadnyana (2019), serta Paradila (2019) dan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil yang berbeda diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Valentino dan Juniarti (2017) menyatakan bahwa, variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Merryana, dkk (2019) juga menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* yang meliputi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan komite audit tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kebaruan variabel kedua yaitu *Intellectual Capital* terhadap kinerja operasional, pada penelitian yang dilakukan oleh Djunaedy (2017), *Intellectual Capital* yaitu modal manusia dan modal struktural berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. Sedangkan dalam penelitian Rahayu (2016), *Intellectual Capital* tidak berpengaruh terhadap kinerja organisasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan fenomena yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa mulai dari banyaknya jumlah LPD di Kabupaten Buleleng dalam kondisi macet dan kurang sehat sampai baru ini salah satu LPD di Kabupaten Buleleng dinyatakan kolaps di tengah pandemi Covid-19 (dikategorikan tidak lapor), dan masih adanya *research gap* hasil penelitian serta penggunaan variabel dan sampel dari penelitian terdahulu, sehingga berupaya untuk melakukan penelitian dengan mengangkat berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, *Good Corporate Governance*, dan *Intellectual Capital* Terhadap Kinerja Operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Terjadinya penurunan kondisi kesehatan LPD di Kabupaten Buleleng.
2. Banyak kondisi LPD di Kabupaten Buleleng dalam kategori kurang sehat, tidak sehat, macet dan tidak lapor.
3. Terjadi penurunan tingkat perolehan laba di masing-masing LPD Se-Kabupaten Buleleng dari Tahun 2018-2020.
4. Terjadinya kondisi kolaps pada beberapa LPD di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja operasional suatu perusahaan atau organisasi. Namun penelitian disini hanya menguji mengenai Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, *Good Corporate*

Governance, dan *Intellectual Capital* terhadap kinerja operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?
4. Bagaimana pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.
2. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Operasional Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat yang diharapkan yaitu dapat memperdalam ilmu dan memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mahasiswa tentang Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, *Good Corporate Governance*, dan *Intellectual Capital* terhadap Kinerja Operasional pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi LPD

Melalui penelitian ini diharapkan LPD, utamanya LPD di Kabupaten Buleleng sebagai lembaga keuangan yang membantu perekonomian desa dapat meningkatkan kinerja operasional untuk menghadapi perubahan lingkungan, menghadapi persaingan dan tetap menjaga eksistensinya, sehingga dapat mencapai visi dan misi LPD.

b. Bagi Undiksha

Melalui penelitian tentang kinerja operasional yang menjurus pada operasional keuangan LPD ini, diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan utamanya pada bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengimplementasikan serta memadukan teori-teori yang diperoleh dari fakta di lapangan.

c. Bagi Desa

Melalui penelitian ini diharapkan desa dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja operasional LPD.

